

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MIMIKA

Abu Bakar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan

Email: stie@stiejb.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the significance of the partial Human Development Index (HDI) and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on poverty levels in Mimika Regency, and to analyze the significance of the effect of HDI and GRDP simultaneously on poverty levels in Mimika Regency. The data used in this study are secondary data obtained from BPS Mimika Regency through documentation techniques. To analyze data, multiple linear regression analysis was used. The results showed that: (a) HDI had a negative and significant effect on the level of poverty in Mimika Regency; (b) GRDP has a negative and not significant effect on the level of poverty in Mimika Regency; (c) HDI and GRDP simultaneously have a significant effect on the level of poverty in Mimika Regency.

Keywords: *Human Development Index, Gross Regional Domestic Product, Poverty*

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja (Widodo, 2006:4). Pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, lebih

ditekankan pada pembangunan ekonomi karena dengan pembangunan ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan atau dapat mendorong perubahan bidang kehidupan lainnya.

Menurut Simatupang dan Saktyanu (Anggaeny, 2016: 1), pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan

melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Oleh karena itu, salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

Di Indonesia, gambaran tentang kemiskinan merupakan sebuah fenomena dan fakta yang terjadi di lapangan, yang permasalahannya belum bisa teratasi baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu, masalah kemiskinan ini masih tetap perlu diperhatikan secara serius karena tujuan utama dari pembangunan Indonesia adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (Arsyad Lincolin, 2010:298-299).

Indeks pembangunan manusia (IPM) sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, dimana IPM dapat menentukan kualitas hidup dan kualitas sumberdaya manusia, sebab kualitas pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Selain itu, pembangunan manusia yang tinggi mengakibatkan jumlah penduduk yang tinggi sehingga akan menaikkan tingkat konsumsi. Apabila tingkat konsumsi meningkat maka pendapatan juga meningkat, ketika pendapatan masyarakat meningkat maka kesejahteraan pun meningkat yang artinya tingkat kemiskinan menurun.

Selain IPM, faktor lain yang memiliki kaitan erat dengan kemiskinan adalah besarnya produk domestik bruto

(PDB), yang pada tingkat daerah disebut dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Kemiskinan dan PDRB memiliki hubungan yang negatif dimana ketika PDRB mengalami peningkatan maka tingkat kemiskinannya menurun. Dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

Kabupaten Mimika di Provinsi Papua yang lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 sebagai kabupaten administratif, yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 menjadi kabupaten otonom, kini pembangunannya sedang gencar dilakukan. Dengan didukung sarana dan prasarana transportasi seperti Bandara Internasional Moses Kilangin dan Pelabuhan Pomako menyebabkan aksesibilitas yang semakin terbuka. Hal ini kian meningkatkan mobilitas penduduk dan barang/jasa ke Kabupaten Mimika.

Fakta menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan pihak swasta belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Mimika. BPS Kabupaten Mimika dalam publikasinya menyebutkan bahwa hingga tahun 2016 masih terdapat 30,12 ribu jiwa penduduk miskin di Kabupaten

Mimika. Berikut disajikan data Kabupaten Mimika dalam kurun jumlah penduduk miskin waktu 2010–2016.

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mimika
Tahun 2010-2016

Tahun	Jumlah (Ribuan Jiwa)	Persentase
2010	41,80	22,57
2011	34,74	18,40
2012	38,70	20,09
2013	40,20	20,37
2014	32,22	16,11
2015	32,85	16,20
2016	30,12	14,72

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2017.

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2010–2016 telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mimika, yakni sebesar 41,8 ribu jiwa pada tahun 2010 menjadi 30,12 ribu jiwa di tahun 2016. Meskipun demikian, jika dilihat dari keadaan Kabupaten Mimika yang ditunjang dengan sumberdaya alam yang dimiliki berupa pertambangan, kehutanan dan perikanan maka seharusnya potensi ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan juga pendapatan Kabupaten Mimika sehingga dapat menekan angka kemiskinan yang tinggi. Tetapi realita yang terjadi adalah Kabupaten Mimika masih tertinggal dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua. Misalnya saja pada tahun 2013 persentase penduduk miskin di Kabupaten Jayapura sebesar 17,58%, Kota

Jayapura sebesar 16,19%, Kabupaten Sarmi sebesar 17,72%, dan Kabupaten Merauke sebesar 12,33%.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Mimika.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Ekonomi

Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional untuk dapat menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun. Pengertian ini sangat bersifat ekonomis. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan

karena pengalaman menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan GNP saja tidak akan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar di negara sedang berkembang. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar masyarakat di negara sedang berkembang yang tidak mengalami perbaikan meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi secara sempit (Arsyad, 2010:11).

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010:11).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinyu; (2) Usaha untuk meningkatkan

pendapatan perkapita; (3) Peningkatan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang; dan (4) Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Untuk dapat meningkatkan kemajuan perekonomian, suatu negara harus memenuhi persyaratan dasar dalam melakukan pembangunan. Prasyarat-prasyarat dasar bagi pembangunan ekonomi menurut M.L Jhingan (2012:41), adalah:

1. Atas dasar kekuatan sendiri, hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari warga negara itu sendiri.
2. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar yang menyebabkan mobilitas faktor dan menghambat ekspansi sektoral dan pembangunan, sehingga diperlukan perbaikan dan penggantian lembaga sosio-ekonomi.
3. Perubahan struktural, adanya peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal.
4. Pembentukan modal, merupakan faktor penting dan strategis di dalam

proses pembangunan. Namun penyediaan atau penciptaan modal akan menjadi sia-sia kalau tidak ada faktor lain yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

5. Kriteria investasi yang tepat, merupakan tanggung jawab negara untuk melakukan investasi yang paling menguntungkan masyarakat, harus dikaji dengan mempertimbangkan keseluruhan kompleks dinamika perekonomian.
6. Persyaratan sosio budaya, wawasan sosio budaya masyarakat haruslah diubah jikalau pembangunan diharapkan dapat berjalan. Kenaikan pendapatan nasional tidak akan membawa kenaikan kesejahteraan sosial, jika kenaikan pendapatan itu kurang dibarengi dengan penyesuaian budaya.
7. Administrasi, kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup, merupakan *sine qua non* pembangunan ekonomi. Tanpa alat perlengkapan administratif yang baik dan efisien, rencana pembangunan publik maupun privat tidak akan dapat dilaksanakan secara sempurna.

Pengertian Kemiskinan

Ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan hidup dapat dikatakan sebagai kemiskinan

(Todaro dalam Wahyudi dan Rejekingsih, 2013:2).

Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad Lincolin, 2010:299)

BKKBN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep/pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga Sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan

pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya. Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS) dan KS-I.

Badan Pusat Statistik (Bappenas, 2010:10) mengemukakan bahwa pendekatan yang digunakan BKKBN ini dianggap masih kurang realistis karena konsep dan KS-I sifatnya normatif dan lebih sesuai dengan keluarga kecil/inti. Selain itu, ke-5 indikator tersebut masih bersifat sentralistik dan seragam, yang belum tentu relevan dengan keadaan dan budaya lokal.

Menurut Badan Pusat Statistik (2016:5), kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Dengan cara membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang per bulan.

Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

Jika diuraikan satu persatu, jumlah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan cukup banyak. Beberapa faktor penyebab kemiskinan di masyarakat khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, yaitu (Chriswardani dalam Ramdhan, 2014:11) :

- a. *Natural assets*: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata pencahariannya.
- b. *Human assets*: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan teknologi).
- c. *Physical assets*: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.
- d. *Financial assets*: berupa tabungan (saving), serta akses untuk memperoleh modal usaha.
- e. *Social assets*: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-keputusan politik.

Jenis-Jenis Kemiskinan

Menurut Baswir dan Sumodiningrat (Ramadhan, 2014:11), secara sosioekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu :

1. Kemiskinan absolut, adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan dibawah garis kemiskinan, atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum antara lain diukur dengan

kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi dan lain-lain.

2. Kemiskinan relatif, adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya, seseorang yang tergolong kaya (mampu) pada masyarakat desa tertentu bisa jadi yang termiskin pada masyarakat desa yang lain.

Di samping itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Bentuk kemiskinan ini terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Kartasasmita, Sumodiningrat dan Baswir dalam Ramadhan 2014:12).

Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari 3 (tiga) indeks yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan, yaitu (Saputra, 2011:31):

- a. Indeks Harapan Hidup
 - b. Indeks Pendidikan
 - c. Indeks Standart Hidup Layak
- Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat

dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun variabel e diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat (Saputra, 2011:33).

Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel). Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin.

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya (Saputra, 2011:33).

Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka Lit), dimana Lit merupakan

proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan concern IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (Saputra, 2011:34).

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu

periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (BPS, 2015:1).

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung (alokasi).

Perhitungan metode langsung dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Walaupun mempunyai tiga pendekatan yang berbeda namun akan memberikan hasil perhitungan yang sama.

Pendekatan produksi (*Production Approach*) dilakukan dengan menghitung nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi (di suatu region) pada suatu jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini disebut juga penghitungan melalui nilai tambah (*value added*). Pendekatan produksi adalah perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu kegiatan/sektor atau sub sektor tersebut. Nilai tambah merupakan selisih antara nilai produksi dan nilai biaya antara. Biaya antara adalah nilai barang dan jasa yang digunakan sebagai input antara dalam proses produksi. Barang dan jasa yang termasuk input antara adalah bahan baku

atau bahan penolong yang biasanya habis dalam sekali proses produksi atau mempunyai umur penggunaan kurang dari satu tahun, sementara itu pengeluaran atas balas jasa faktor produksi seperti upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan yang diterima perusahaan bukan termasuk biaya antara.

Pendekatan pendapatan (*Income Approach*) dilakukan dengan menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor-faktor produksi yang ikut dalam proses produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (setahun). Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini diperoleh dengan menjumlahkan semua balas jasa yang diterima pemilik faktor produksi yang komponennya terdiri dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan ditambah dengan penyusutan dan pajak tidak langsung neto.

Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*) dilakukan dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto di suatu wilayah. Perhitungan PDRB melalui pendekatan ini dilakukan dengan bertitik tolak dari penggunaan akhir barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik.

Penghitungan PDRB dengan metode tidak langsung atau metode alokasi diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini, digunakan beberapa alokator antara lain: Nilai produksi bruto dan netto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan; jumlah produksi fisik; tenaga kerja; penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya. Dengan menggunakan salah satu atau beberapa alokator dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing provinsi terhadap nilai tambah setiap sektor dan subsektor.

Terdapat dua cara untuk penyajian PDRB, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Konstan artinya semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap, sehingga perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan produksi riil bukan karena kenaikan harga atau inflasi. Atau dengan kata lain PDRB atas dasar harga konstan adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap (harga pada tahun dasar) yang digunakan selama satu tahun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah jumlah nilai produksi atau pendapatan (pengeluaran) yang dinilai sesuai dengan harga yang

berlaku pada tahun yang bersangkutan.

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan perekonomian suatu daerah baik secara agregat (keseluruhan) maupun sektor. Selain itu juga bermanfaat untuk melihat perubahan struktur perekonomian suatu daerah berdasarkan distribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap nilai total PDRB. Pendapatan perkapita yang diperoleh dari perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya.

Hubungan IPM dengan Kemiskinan

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan IPM dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahliannya akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan

produktivitas kerjanya. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga perusahaan juga akan memberikan gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang.

Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk, mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM

adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam penanganan kemiskinan.

Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai korelasi yang luas. Namun pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis meningkatkan IPM. Demikian pula, perbaikan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM tidak selalu mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin. Misalnya, berbagai peningkatan hasil panen hanya menguntungkan pemilik tanah dan bukan tenaga kerja. Akan tetapi, kondisinya bisa berubah. Masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan serta peningkatan IPM jika pemerintah menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan akses pendidikan.

Hubungan PDRB dengan Kemiskinan

Menurut Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi

adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Menurut Todaro (Tambunan, 2001) pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Menurut Kuznet (Tambunan, 2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.

RANCANGAN PENELITIAN

Daerah dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah determinan kemiskinan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian, yakni dengan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun keterangan yang tersedia pada berbagai institusi. Selain data-data laporan tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga dicari berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet.

Model dan Metode Analisis Data

Untuk mengukur determinan kemiskinan di Kabupaten Mimika, digunakan analisis regresi linear berganda yang dirumuskan sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$
Keterangan:

Y = Tingkat kemiskinan (ribuan jiwa)
 X_1 = IPM (poin)
 X_2 = PDRB (jutaan rupiah)
 a = konstanta
 b_1, b_2 = koefisien regresi

e = error term atau galat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Adapun metode yang digunakan adalah Metode Statistik One Sample Kolmogorov–Smirnov. Pengambilan keputusan normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov–Smirnov adalah jika nilai signifikansi Kolmogorov–Smirnov > alpha maka residual dalam model terdistribusi secara normal, dan sebaliknya jika nilai signifikansi Kolmogorov–Smirnov < alpha maka residual dalam model tidak terdistribusi secara normal.

Dengan menggunakan taraf signifikansi (alpha) 5% dan n = 7, diperoleh hasil output uji normalitas dengan bantuan SPSS sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Ouput Uji Normalitas Dengan Bantuan SPSS

Kolomogorov-Smirnov ^a		
Statistic	Df	Sig.
0,478	7	0,976

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018.

Dari hasil output SPSS di atas, terlihat bahwa nilai Kolmogorov–Smirnov statistic sebesar 0,478 dengan signifikansi = 0,976. Sesuai ketentuan uji normalitas data menggunakan Kolmogorov–Smirnov dimana nilai signifikansi Kolmogorov–Smirnov lebih besar dari nilai alpha, ($0,976 > 0,05$), maka nilai residual dalam model adalah terdistribusi secara normal.

b. Heteroskedastisitas

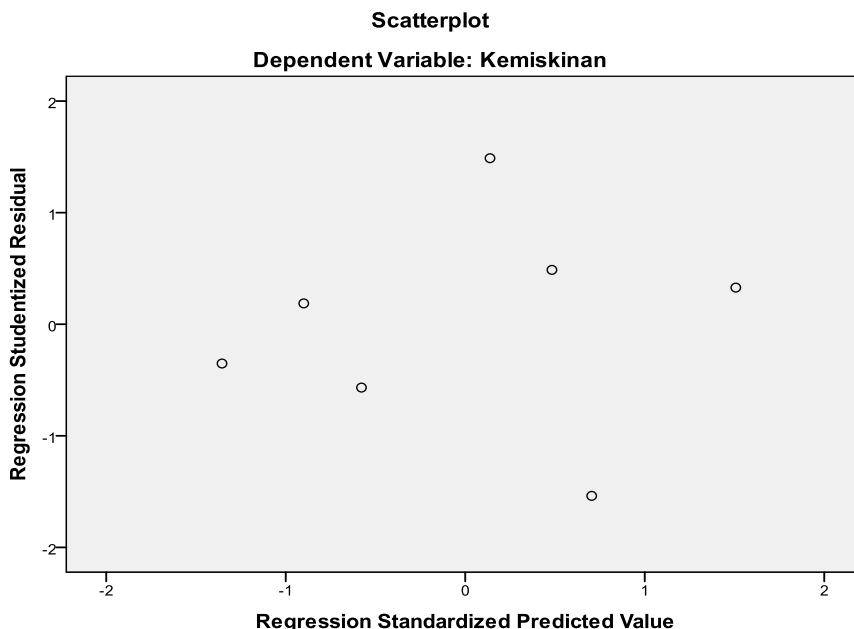
Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah homoskedastisitas atau dengan kata lain model harus bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimate*). Kondisi ini tercapai jika

semua residual atau *error* memiliki varian yang sama. Apabila varian *error* tidak konstan atau berubah-ubah, maka hal ini disebut heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode grafik, yakni dengan melihat grafik scatterplot dari nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Model dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak terdapat pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y.

Berikut disajikan scatterplot pengujian heteroskedastisitas.

Gambar 1
Hasil Ouput Uji Heteroskedastisitas Dengan Bantuan SPSS



Sumber: Hasil Output SPSS, 2018.

Dari scatterplot residual di atas, terlihat residual tidak membentuk pola atau ragam konstan, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

c. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi terdapatnya hubungan linier atau korelasi yang

tinggi antara masing-masing variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah multikolinearitas. Model regresi dikatakan bebas dari multikolinearitas jika nilai *Tolerance* di atas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10.

Berikut disajikan hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan bantuan SPSS.

Tabel 3
Hasil Ouput Uji Multikolinearitas Dengan Bantuan SPSS
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
IPM	0,901	1,110
PDRB	0,901	1,110

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018.

Dari hasil pengujian multikolinearitas di atas, terlihat bahwa nilai *Tolerance* kedua variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sesuai dengan ketentuan pengujian multikolinearitas dengan menggunakan *Tolerance* dan VIF maka dapat disimpulkan model regresi dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

2. Pengaruh IPM dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mimika

Untuk mengukur pengaruh IPM (X_1) dan PDRB (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Mimika tahun 2010-2016, digunakan analisis regresi linear berganda. Adapun bentuk persamaan regresinya adalah : $Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, hasil output dapat diringkas sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Output Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	239,808	62,832		3,817	0,019
IPM	-2,982	0,941	-0,875	-3,168	0,034
PDRB	-0,00000006791	0,000	0,087	0,315	0,769

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Sumber: Hasil Output SPSS, 2018.

Berdasarkan hasil analisis yang ditunjukkan pada tabel di atas, maka dapat disusun persamaan

regresinya sebagai berikut :

$$Y = 239,808 - 2,982X_1 - 0,00000006791X_2$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai Konstanta (b_0) = 239,808

Dapat diartikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika sebesar 239,808 ribu jiwa yang tidak dipengaruhi oleh IPM (X_1) dan PDRB (X_2), dengan asumsi variabel lain adalah konstan (*ceteris paribus*).

- b. Nilai koefisien IPM (b_1) = - 2,982

Dapat diartikan jika IPM meningkat sebesar satu poin maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 2,982 ribu jiwa.

- c. Nilai koefisien PDRB (b_2) = -0,00000006791

Dapat diartikan jika PDRB meningkat sebesar satu satuan atau 1 juta rupiah, maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 0,00000006791 ribu jiwa.

3. Uji Statsitik

a. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen di dalam model dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Adapun hipotesis uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho: IPM dan PDRB secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika.

Ha: IPM dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika.

Kriteria pengujian uji F adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima, artinya bahwa secara simultan variabel IPM dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika, sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_o diterima, artinya bahwa secara simultan variabel IPM dan PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika.

Dengan menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$), dk pembilang = 2 dan dk penyebut = 4, diperoleh $F_{tabel} = 6,94$. Sedangkan untuk nilai $F_{hitung} = 7,529$ dengan tingkat probabilitas 0,046 (signifikan). Dengan demikian tampak bahwa

$F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7,529 > 6,94$) dan probabilitas $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM dan PDRB secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika.

b. Uji t (Uji Parsial)

Uji signifikansi parsial (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen jika nilai $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$.

- 1) Pengaruh IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mimika
Pengaruh IPM (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Mimika tahun 2010-2016 diukur dengan menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) ($df = n - k = 7 - 3 = 4$), maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,13, sedangkan dari hasil analisis regresi berganda diperoleh t_{hitung} sebesar -3,168.

Karena pengujian yang digunakan adalah uji satu sisi (*one thail*) sebelah kiri, maka nilai t_{tabel} dikonversi menjadi nilai negatif menjadi -2,13, dan kriteria pengujiannya adalah jika nilai $t_{hitung} < \text{nilai } t_{tabel}$ maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Dari hasil analisis dan ketentuan di atas, maka diketahui nilai t_{hitung} variabel IPM sebesar -3,168 lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar -2,13 ($-3,168 < -2,13$), sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Mimika.

- 2) Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Mimika
Pengaruh PDRB (X_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Mimika tahun 2010-2016 diukur dengan menggunakan taraf signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan (*degree of freedom*) ($df = n - k = 7 - 3 = 4$), maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,13, sedangkan dari hasil analisis regresi

berganda diperoleh t_{hitung} sebesar 0,315.

Karena pengujian yang digunakan adalah uji satu sisi (*one tail*) sebelah kiri, maka nilai t_{tabel} dikonversi menjadi nilai negatif menjadi -2,13, dan kriteria pengujiannya adalah jika nilai $t_{hitung} <$ nilai t_{tabel} maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Dari hasil analisis dan ketentuan di atas, maka diketahui nilai t_{hitung} variabel PDRB sebesar 0,315 lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar -2,13 ($0,315 > -2,13$), sehingga dapat disimpulkan bahwa PDRB (X_2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten Mimika.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan secara komprehensif terhadap variabel dependen. Nilai R^2 (Koefisien Determinasi) mempunyai *range* antara 0-1. Semakin besar R^2 mengindikasikan semakin

besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil dari analisis regresi dengan bantuan SPSS, diperoleh R^2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,725 artinya variabel dependen dalam model tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika dijelaskan oleh variabel independen yaitu IPM (X_1) dan PDRB (X_2) sebesar 72,5%, sedangkan sisanya sebesar 27,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis dengan uji t , diketahui bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Mimika mulai melakukan pembangunan infrastruktur jalan dan telah membuka akses menuju ke daerah-daerah yang dulunya sulit dijangkau. Ditambah lagi dengan pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan yang gencar dilakukan. Sebagai dampaknya, aksesibilitas masyarakat di daerah terpencil semakin terbuka, serta tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat ikut

membaik. Dengan membaiknya akses jalan, pendidikan dan kesehatan, masyarakat di daerah terpencil yang umumnya tergolong masyarakat miskin mampu meningkatkan ekonomi keluarganya. Selain itu, dengan modal pendidikan dan kesehatan yang baik, masyarakat Kabupaten Mimika memiliki daya saing dalam dunia kerja sehingga meningkatkan produktivitas, yang pada akhirnya ikut menurunkan tingkat kemiskinan.

2. Pengaruh PDRB Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil analisis dengan uji t, diketahui bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika. Hal ini disebabkan peningkatan nilai PDRB hanya berasal dari sekelompok masyarakat tertentu saja sehingga peningkatan PDRB tidak menyebabkan pemerataan pendapatan, sehingga kemiskinan tidak teratasi.

Seperti yang diketahui bahwa PDRB Kabupaten Mimika sangat dipengaruhi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, yang berasal dari PT Freeport Indonesia, dimana sektor ini mampu menyumbang kontribusi di atas 80% terhadap PDRB Kabupaten Mimika setiap tahunnya. Sementara itu, hasil

peningkatan PDRB ini hanya dirasakan oleh sekelompok masyarakat yang merupakan keluarga karyawan PT Freeport Indonesia. Di lain sisi multiplier efek dari sumbangan PT Freeport Indonesia ini semakin dirasakan berkurang, sebab pendapatan masyarakat yang diperoleh dari PT Freeport sebagian besar ditransfer ke luar daerah. Akibatnya, perekonomian di Kabupaten Mimika terimbas lesu, pendapatan menurun, tabungan menurun, dan upaya penurunan tingkat kemiskinan berjalan lambat.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Todaro (2006) bahwa pada negara berkembang seperti Indonesia, baik secara nasional maupun pada tingkat daerah, peningkatan PDB/PDRB yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi terkadang hanya berasal dari sejumlah golongan masyarakat sehingga manfaat dari pertumbuhan tidak bersifat inklusif yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang semakin parah (meningkat). Pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada variabel makro-ekonomi, terutama arus penanaman modal dan peningkatan ekspor, memang seringkali tidak memiliki kaitan yang kuat dengan pengentasan penduduk miskin. Kaitan

tersebut menjadi semakin lemah, ketika arus penanaman modal tersebut lebih banyak bergerak pada usaha padat modal dan sektor-sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang rendah. Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif ataupun pertumbuhan yang berpihak kepada kaum miskin, sebagai sebuah terminologi baru dalam wacana pembangunan dewasa ini, perlu didorong dan diintensifkan di Kabupaten Mimika, baik pada tingkatan rencana maupun pada tingkatan implementasi.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika.
2. PDRB berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika
3. IPM dan PDRB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Mimika.

SARAN

Merujuk pada kesimpulan di atas, dapat diberikan beberapa saran sebagai

rekomendasi dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu mempertahankan dan meningkatkan IPM Kabupaten Mimika dengan cara melaksanakan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan dan merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD. Dengan memastikan hal tersebut maka diharapkan IPM Kabupaten Mimika dapat meningkat dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan.
2. Pemerintah Kabupaten Mimika perlu menciptakan peningkatan PDRB atau pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang berpihak pada masyarakat miskin. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan menjadikan sektor-sektor yang padat karya sebagai *leading sector* sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang terus-menerus tumbuh, sehingga tujuan pertumbuhan ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat tercapai.
3. Dalam upaya mengurangi jumlah kemiskinan di Kabupaten Mimika, pada tingkatan mikro, program-program yang diarahkan untuk menekan beban pengeluaran penduduk miskin di satu sisi, dan

meningkatkan produktivitas penduduk miskin di sisi lain, harus terus diintensifkan. Program layanan pendidikan dan kesehatan untuk rumah tangga miskin perlu terus dilanjutkan dengan memperluas jangkauan dan meningkatkan aksesibilitas. Program semacam ini, disamping dapat menekan beban pengeluaran penduduk miskin dalam jangka pendek, juga dapat memperbaiki kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia penduduk miskin dalam jangka panjang. Menyertai usaha tersebut, program-program yang diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas penduduk miskin juga harus terus diupayakan dan ditingkatkan intensitas dan jangkauannya, misalnya melalui pemberian kredit mikro, program padat karya, pelatihan keterampilan, dan sebagainya;

REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- , 2008. *Ekonomi Archipelago*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- , 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- BPS Kabupaten Mimika. 2016. *Mimika Dalam Angka (Mimika Regency in Figures) 2016*.
- Bappenas. *Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera I/KS-I)*. Direktorat Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kediputian Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Bappenas, Jakarta. 2010.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi Dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. BPFE, Yogyakarta.
- Jhingan M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan*. Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mankiw, N. G. 2000. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat*. Erlangga, Jakarta.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Edisi Pertama*. Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.

- Nikijuluw, J. B. 2013. *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku*. Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika Volume VII (2), hal. 196 – 203.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Samuelson, P. A. dan Nordhaus, W. D. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi*. PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Saputra, Whisnu Adhi. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran, Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional*. Penerbit Pustaka Bangsa, Medan
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Penerbit Baduose Media: Sumatra Barat.
- Sukirno, Sadono. 2009. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Cetakan Ketiga*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Subandi. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta, Bandung.
- Tambunan. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh*. Penerbit Airlangga, Jakarta.
- Todaro, M. P dan Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Wahyudi, Dicky dan Tri Wahyu Rejekingsih. *Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah*. Diponegoro Journal Of Economic Volume 2 Nomor 1 Tahun 2013. Jurusan IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Hal 1 – 15.

